

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

BAKESBANGPOL KOTA BANJARBARU



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANJARBARU

TRIWULAN III

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM	11
BAB V	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. Kuesioner	13
2. Hasil Pengolaha Data	13
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	14
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut pada Periode Selanjutnya	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru** sebagai salah satu penyedia layanan publik di Pemerintahan Kota Banjarbaru, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Administrasi yang telah diberikan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru**.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TRIWULAN III Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Scan Barcode di isi di Handphone pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru yaitu :

1. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
2. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Tidak ada Biaya** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat untuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru tidak dikenakan biaya / Gratis.
5. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

6. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan melalui online ataupun offline didata oleh Admin SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Triwulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Juli – September 2025	90
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2025	10

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2025	15
----	--------------------------------	----------------	----

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru berdasarkan Triwulan III. jumlah penerima layanan di triwulan III tahun 2025. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam Triwulan III SKM adalah 11 orang.



BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh untuk Triwulan III yaitu 11 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	3	27,27 %
		PEREMPUAN	8	72,73 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0 %
		SLTA	3	27,27 %
		DIII	0	0 %
		SI	7	63,63 %
		S2	1	9,09 %
3	PEKERJAAN	PNS	1	9,09 %
		Wirausaha	2	18,18 %
		SWASTA	0	0 %
		PELAJAR	4	36,36 %
		LAINNYA	4	36,36 %
4	JENIS LAYANAN	Pelaporan Keberadaan Ormas	1	9,09 %
		Surat Rekomendasi Penelitian	10	90,91 %

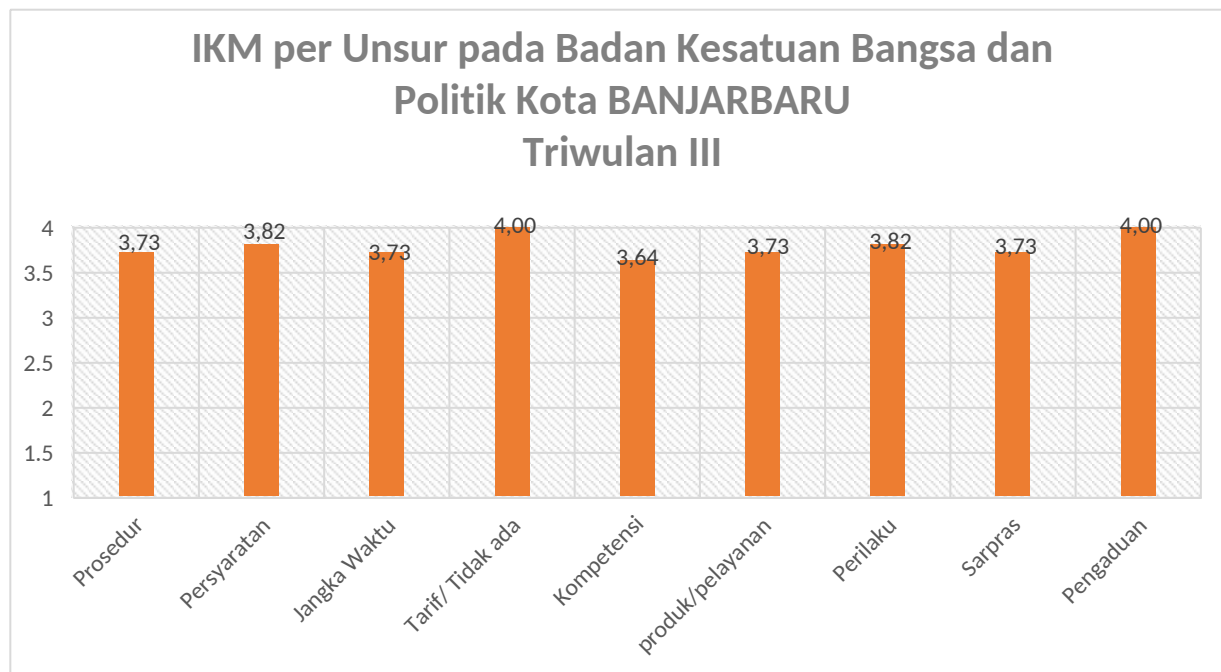
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,73	3,82	3,73	4,00	3,64	3,73	3,82	3,73	4,00
Kategori	A	A	A	A	B	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,95 (A SANGAT BAIK)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

A. Kelebihan Unsur Pelayanan

1. Kehadiran Pegawai Memberikan Kepastian Layanan
 - Masyarakat merasa dilayani secara langsung dan cepat.
 - Mengurangi kebingungan karena ada petugas yang bisa memberikan informasi dengan jelas.
2. Meningkatkan Responsif dan Kepuasan Masyarakat
 - Petugas dapat merespons kebutuhan atau keluhan secara real-time.
 - Menumbuhkan kepercayaan dan citra positif terhadap instansi.
3. Memudahkan Koordinasi Internal
 - Pegawai yang standby di ruang pelayanan bisa berkoordinasi cepat dengan bagian lain.
 - Proses administrasi menjadi lebih efisien.
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan
 - Dengan adanya pegawai di tempat, lebih mudah memantau pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur).
 - Pelayanan cenderung lebih disiplin dan teratur.

B. Kelemahan / Permasalahan Unsur Pelayanan Saat Ini

1. Kurangnya Pegawai di Ruang Pelayanan
 - Pengunjung tidak mendapatkan informasi atau pelayanan secara langsung.
 - Menimbulkan kesan lambat, tidak sigap, atau kurang profesional.

✓ Rekomendasi / Solusi Perbaikan

1. Menempatkan Pegawai Tetap di Ruang Pelayanan
 - Jadwalkan petugas piket secara bergiliran agar selalu ada yang standby.
 - Utamakan pegawai yang paham alur layanan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM

- Berikan pelatihan komunikasi, etika pelayanan publik, dan pemahaman prosedur.
 - Evaluasi berkala performa pegawai pelayanan.
3. Optimalisasi SOP dan Fasilitas
- Tempelkan informasi layanan yang mudah dipahami.
 - Perbaiki sistem antrean dan kenyamanan ruang tunggu.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala
- Lakukan survei kepuasan masyarakat.
 - Buat sistem laporan mingguan dari petugas pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

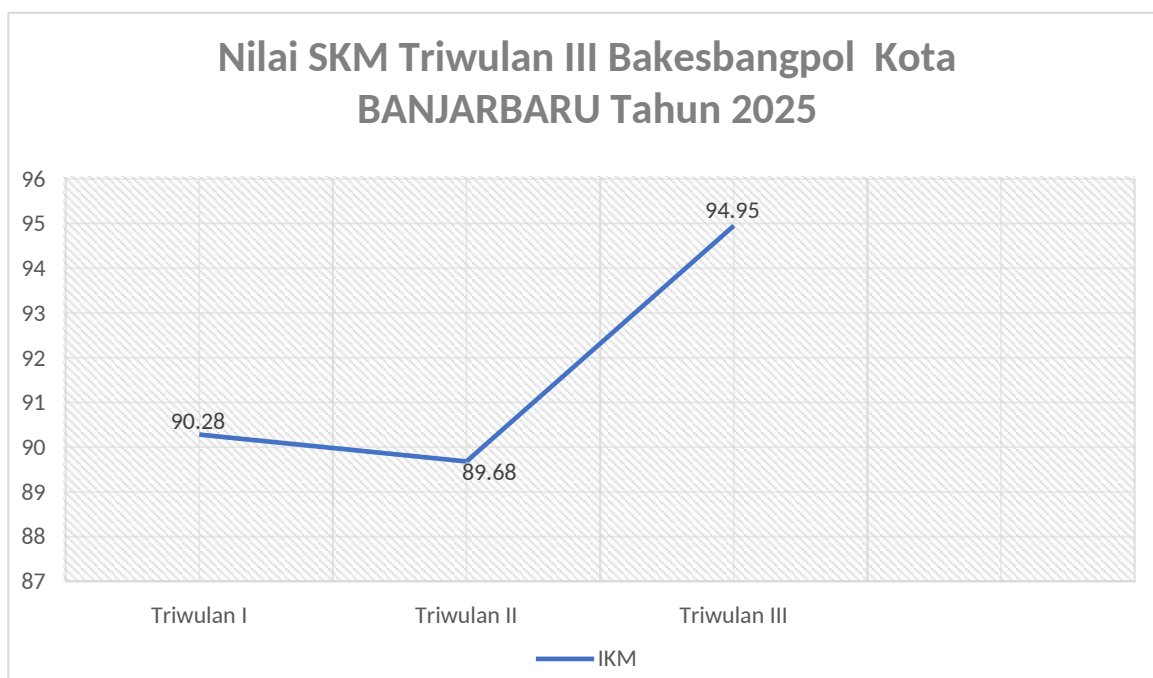
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kompetensi Pelaksana Nilai : 3,64	Peningkatan Kapasitas Kompetensi dalam hal melayani	Semua Bidang
		Lebih sering komunikasi dengan penerima pelayanan	Semua Bidang
		Simplifikasi penjelasan pelayanan	Semua Bidang
		Sikap dan etika melayani Kuisisioner	Semua Bidang

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru:



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan II pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

CONTOH KUESIONER

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA DISDUKCAPIL KOTA PALU

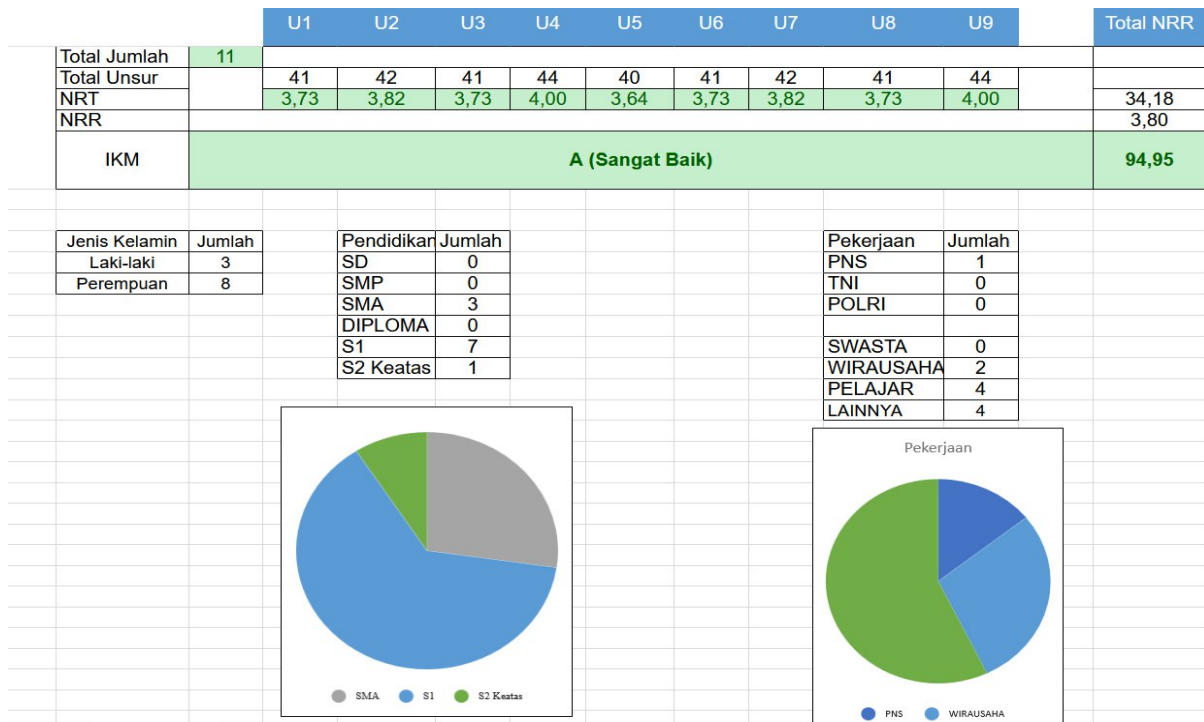
Tanggal : / /		Waktu : 08.00 – 12.00* 13.00 – 17.00*	
Jenis Layanan yang diterima :			
Profil Responden			
Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P		Usia : Tahun	
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3			
Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ Polri ☐ Swasta ☐ Wirausaha ☐ Lainnya :			

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. 1. Tidak kompeten 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten	
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan 1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah	
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. 1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat 4. Sangat cepat	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana 1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik	
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 1. Sangat mahal 2. Cukup mahal 3. Murah 4. Gratis	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi kurang maksimal 4. Dikelola dengan baik	
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. 1. Tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Sesuai 4. Sangat sesuai		SARAN DAN MASUKAN :

2. Hasil Olah Data online SKM TRIWULAN III



Hasil Olah Data SKM

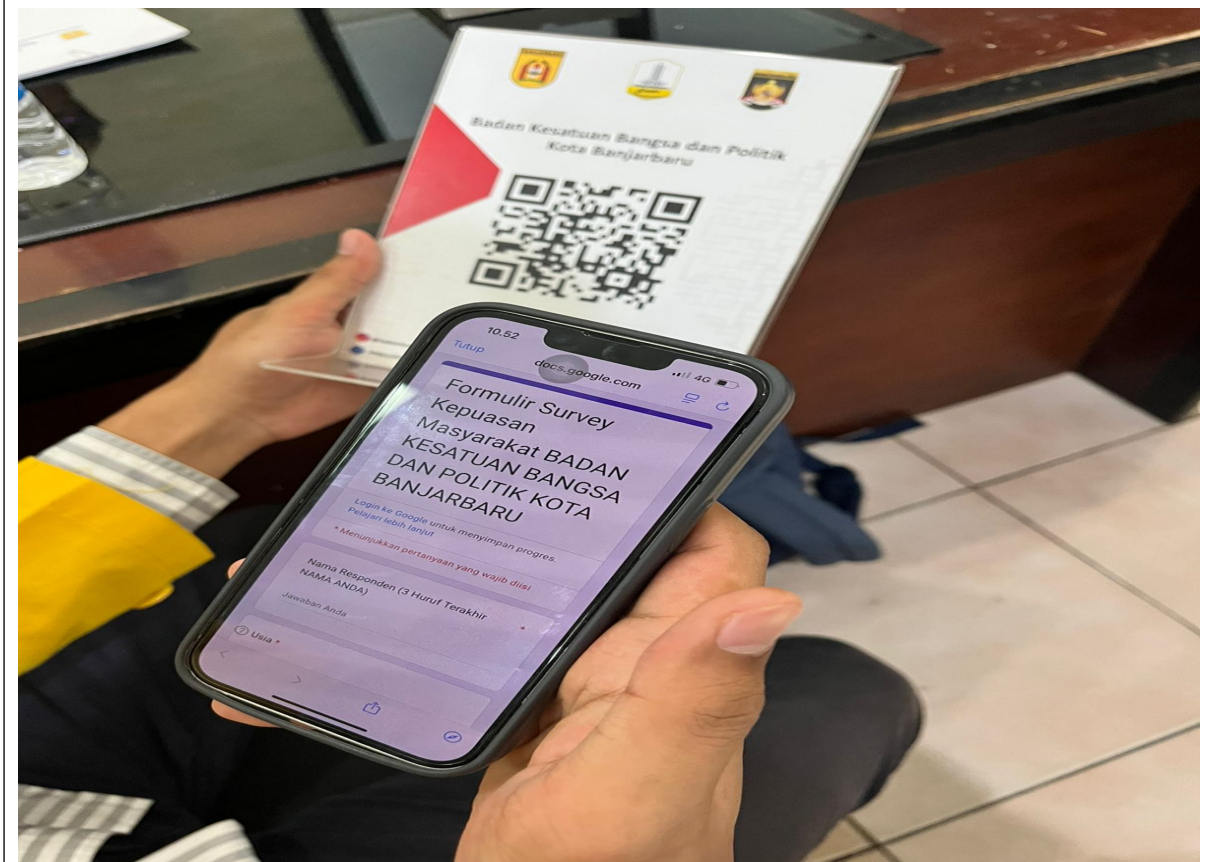
Pengolahan data SKM 3.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Nama Instansi	Nama Pengisi	Waktu Pelayanan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Status Pekerjaan	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik dan Saran	No. Telp	Usia	Total Penilaian Unsur	Rata-rata Unsu	IKM
2		Aly	12.00 sd 17.00	Perempuan	S2 Keatas	PNS	Pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-		37	36	4,00	100,00
3		mah	08.00 sd 12.00	Perempuan	S1	PELAJAR	kesbangpol	3	4	4	4	3	4	3	3	4	-	89522133688	21	32	3,56	88,89
4		Angga	12.00 sd 17.00	Laki-laki	SMA	PELAJAR	Rekomendasi Penelitian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih atas kemudahan dalam pembuatan surat rekomendasi	81908196341	21	36	4,00	100,00
5		Dian Alfisah	08.00 sd 12.00	Perempuan	S1	PELAJAR	surat perizinan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	tidak ada	81257030615	21	36	4,00	100,00
6		Vania Anargya	08.00 sd 12.00	Perempuan	S1	PELAJAR	surat perizinan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	82232553333	21	36	4,00	100,00
7		Nda	12.00 sd 17.00	Perempuan	SMA	WIRAUUSAHA	pengajuan penelitian skripsi	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4 bintang 4	85939314290	22	30	3,33	83,33
8		IHA	12.00 sd 17.00	Perempuan	S1	MAHASISWA	Permohonan Penelitian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sudah mantap	8971127482	21	36	4,00	100,00
9		SAN	12.00 sd 17.00	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Membuat surat rekomendasi penelitian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Cukup	-	22	36	4,00	100,00
10		ati	12.00 sd 17.00	Perempuan	SMA	Mahasiswa	izin penelitian	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4 tidak ada	82255893283	20	34	3,78	94,44
11		Fitri	08.00 sd 12.00	Perempuan	S1	WIRAUUSAHA	Ormas	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4 Lebih ditingkatkan lagi	81347511996	26	29	3,22	80,56
12		Din	08.00 sd 12.00	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Pembuatan surat izin penelitian	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4 Sangat baik dalam pelayanan	81256235121	22	35	3,89	97,22

BARCODE SKM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU



Dokumentasi Terkait Pelaksanaan



BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Triwulan Kedua periode mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,95. Meskipun demikian, nilai SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Sangat baik.
- Tidak ada Biaya atau Gratis untuk penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
- Kendala yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak adanya menempatkan pegawai tetap diruang pelayanan.
- Solusinya Jadwalkan petugas piket secara bergiliran agar selalu ada yang standby, utamakan pegawai yang paham tentang pelayanan.

Kota Banjarbaru, 1 Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



H. RIZANA MIRZA, SH, M.Kes

NIP. 19660828 199303 1 007